



APBD KOTA YOGYA 2018 BERHASIL DITETAPKAN

Target Dinilai Rendah, PAD Harus Dioptimalkan

YOGYA (KR) - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogya 2018 berhasil ditetapkan, Rabu (29/11). Meski tidak melewati batas waktu, namun target pendapatan asli daerah (PAD) dinilai masih rendah. Pemkot pun diminta mengoptimalkan PAD, agar pembangunan daerah dapat digenjut.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya, Kadri Renggono tidak menampik sejumlah catatan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Yogya tersebut. Target PAD itu mencapai Rp 547 miliar atau 34 persen dari total pendapatan Rp 1,6 triliun. "Sebenarnya target itu sudah kami naikkan dari tahun ini. Tapi rekomendasi Banggar kami pastikan akan dijalankan," tandasnya usai rapat paripurna penetapan APBD 2018, kemarin.

Pada tahun ini, target PAD mencapai Rp 510 miliar.

Sedangkan penetapan target PAD di tahun 2018, imbuh Kadri, sudah memperhitungkan realitas potensi pendapatan. Oleh karena itu, jika PAD dinilai belum maksimal dikarenakan beberapa sebab. Di antaranya pendapatan dari retribusi terpaksa ada penurunan karena retribusi izin gangguan atau HO sudah dihapuskan. Padahal, potensi pendapatan retribusi HO tiap tahun bisa mencapai Rp 500 juta.

Selain itu juga ada penurunan target pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti PD Jogjatama dan Vihesha maupun PDAM. Pendapatan dari kedua perusahaan daerah tersebut sengaja tidak dipatok tinggi karena harus menjalankan fungsi pelayanan.

Sementara anggota Banggar DPRD Kota Yogya yang juga Ketua Komisi B DPRD Kota Yogya, Nasrul Khairi, menilai kebutuhan pembangunan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Apalagi Kota Yogya juga dibebani belanja pegawai yang cukup besar. "Cara untuk mengimbangi beban itu ialah dengan mengoptimalkan potensi PAD. Pemkot

tidak boleh bergantung pada dana perimbangan dari pusat yang kecenderungan setiap tahun juga menurun," katanya.

Nasrul membandingkan wilayah Bandung dan Bali yang sama-sama mengandalkan sektor pariwisata. Kedua daerah tersebut mampu memperoleh PAD hingga di atas 50 persen dari total pendapatan daerah. Sehingga, meski Kota Yogya tidak memiliki sumber daya alam yang bisa dikeruk, namun seharusnya tidak dijadikan alasan untuk tidak mengoptimalkan PAD.

Dirinya pun menyarankan perlunya perbaikan pemungutan pajak agar tidak terjadi kebocoran. Apalagi sepanjang tahun 2016 ada catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kekurangan pembayaran dari wajib pajak.

"Berarti memang pengalihan pajak selama ini kurang maksimal. Perlu juga penerapan sistem pembayaran pajak secara online agar celah kebocoran dapat ditekan," tandasnya.

Nasrul menambahkan, optimalisasi pajak juga perlu dibarengi dengan sosialisasi yang massif. Tidak hanya menyosialisasikan kewajiban membayar pajak, namun juga dampak pembangunan dari pajak yang dibayarkan masyarakat juga perlu disosialisasikan supaya masyarakat memahami bahwa pejsaknya selama ini bermanfaat.

(Dhi)-
 Sekretaris

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005